



## Pengelolaan Septic Tank Warga Buruk



**Septic tank itu harus dikuras, setidaknya tiga tahun sekali. Kadang masyarakat tidak tahu. Kalau tidak dikuras, akan mencemari lingkungan.**

**YOGYA, TRIBUN** - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta sedang mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Air Limbah Domestik atau Simpel Saldo.

Kepala DPUPKP Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono menjelaskan, BOD atau Biochemical Oxygen Demand yang merupakan indikator pencemaran lingkungan, yang ada di tiga sungai Kota Yogyakarta telah melebihi ambang batas.

"Kebutuhan BOD adalah 3,0 mg per liter. Namun di tiga sungai 4 mg. Berarti limbah ini selain mencemari air sungai, juga berimbas pada tanah" jelasnya, di ruang kerjanya, Rabu (17/10).

Ketika tercemar, lanjutnya, berarti pengelolaan limbah tidak tertata dengan baik. Hal itu dikarenakan topografi Kota Yogyakarta membuat beberapa

kawasan tidak memungkinkan untuk bisa tersambung dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Sewon maupun IPAL komunal. "Di Kota Yogyakarta ini terdapat 56 IPAL komunal tapi belum semuanya terlayani," ucapnya.

Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman DPUPKP Kota Yogyakarta, Cicilia Novi Hendrawati menjelaskan selama ini kesadaran warga untuk menguras *septic tank* masih rendah. Mereka yang menguras, lanjutnya, biasanya melakukannya dengan terpaksa lantaran saluran yang sudah terlanjur buntu.

● ke halaman 19

## Pengelolaan Septic

● Sambungan Hal 13

"Septic tank itu harus dikuras, setidaknya tiga tahun sekali. Kadang masyarakat tidak tahu. Kalau tidak dikuras, akan mencemari lingkungan. Endapan yang tidak disedot, akan mencemari air tanah, lalu konstruksi limbah bocor sehingga lewat saja dan mencemari air tanah," jelasnya.

Kabid Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan DPUPKP Kota Yogyakarta, Sigit Setiawan menjelaskan untuk saat ini pihaknya menangani

kawasan Patangpuluhan sebagai *pilot project* dari Simpel Saldo. Alasan dipilihnya kawasan tersebut berdasarkan data dari Bappeda di mana terdapat prioritas kecamatan dengan kepemilikan jamban tidak aman.

"Saat ini proses pendataan telah berlangsung. Setelah pendataan selesai, nanti akan diteruskan dengan tindakan," ujarnya.

Sigit menjelaskan, dalam pendataan tersebut, ketika *septic tank* tidak memenuhi syarat, maka akan ada pola penanganan. Perawatan *septic tank*, lanjutnya, ada pengurasan berkala setiap tiga tahun sekali.

"Di APBD ada pembangunan *septic tank* komunal, bisa direkomendasikan ke Dinkes untuk yang pabrikan jambanisasi. Kementerian dan dari DAK menawarkan pembanguna *septic tank* individu, ini juga bisa kami masukan dalam data nanti saat penanganan," bebernya.

Walau demikian, ia berharap agar warga yang melakukan pendataan dapat memberikan keterangan yang valid kepada petugas yang ada di lapangan.

"Jangan bilang *septic tank* remuk, padahal tidak. Hanya untuk mendapatkan bantuan ini," ucapnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005